

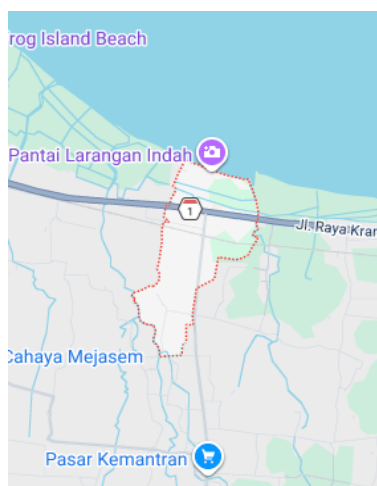
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Desa Munjungagung

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 2. 1 Peta Desa Munjungagung



Sumber: Profil Desa Munjungagung, 2026

Lokalisasi Wandan terletak di Kabupaten Tegal bagian utara dan lebih tepatnya berada di Kecamatan Kramat, Desa Munjungagung. Letaknya cukup strategis yang berada di jalur pantura. Secara geografis, desa ini terletak di wilayah pesisir Laut Jawa, sehingga memiliki topografi datar rendah dengan ketinggian sekitar 4 m di atas permukaan laut. Desa ini berada di sepanjang jalur Jalan Pantura sehingga mudah diakses dan menjadi desa transit antarwilayah pesisir. Selain itu juga terletak sejauh 7 km dari pusat Kota Tegal. Desa Munjungagung secara geografis berada pada koordinat -6.876351, 109.188242. Dengan luas wilayah kurang lebih

210,10 ha. Desa Munjungagung terbagi menjadi dua pedukuhan yaitu Larangan dan Karangjati. Berada di pesisir laut Jawa dan berbatasan dengan Desa Bongkok di sebelah timur, Desa Kemantran di sebelah selatan, Desa Padaharja di sebelah Barat dan Laut Jawa di sebelah Utara. Letak tersebut yang langsung berbatasan dengan laut membuat desa ini memiliki karakter pesisir dan menjadi pusat kegiatan nelayan di wilayah Kecamatan Kramat. Secara administratif, Desa Munjungagung menglingkupi 5 (lima) Rukun Warga (RW), yaitu RW I, RW II, RW III, RW IV, dan RW V, serta setiap RW memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4 (empat), yaitu RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 sehingga total 20 (dua puluh) wilayah Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan data profiling desa jumlah penduduk Desa Munjungagung relatif tinggi untuk ukuran desa pesisir, yakni sebanyak 2829 jiwa per km². Hal ini menunjukkan wilayah yang cukup padat dan aktif penduduknya. Desa Munjungagung memiliki jumlah penduduk sekitar 6.728 jiwa. Secara spesifik, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan angka yang relatif berimbang, sengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.396 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.332 jiwa. Jumlah ini terdistribusi ke dalam 2.204 Kepala Keluarga (KK). Komposisi penduduk yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan menunjukkan dinamika sosial masyarakat yang beragam, serta pentingnya peran laki-laki dalam sektor ekonomi produktif dan perempuan di sektor

rumah tangga maupun usaha mikro. Berikut rincian persebaran penduduk di setiap RW:

Tabel 2. 1 Persebaran Penduduk Desa Munjungagung

RW	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Total Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
RW I	487	486	973	334
RW II	664	622	1.286	431
RW III	628	624	1.252	402
RW IV	752	764	1.516	489
RW V	656	616	1.272	421
Total	3.192	3.536	6.728	2.077

Sumber: Data dari Desa Munjungagung yang diolah penulis, 2025

2.1.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat

Secara umum masyarakat di Desa Munjungagung adalah masyarakat nelayan. Hal ini karena Desa Munjungagung berada di pesisir Laut Jawa dimana dikelilingi oleh berbagai aktivitas di sektor perikanan laut. Aktivitas nelayan dilakukan dengan baik sebagai nelayan tangkap, pengolahan hasil laut, dan fasilitas logistik hasil tangkapan seperti kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menjadi pusat ekonomi lokal. Selain sektor perikanan, banyak warga desa juga bermata pencaharian pada sektor pertanian di lahan sawah yang produktif dan perkebunan kecil di kawasan desa.

Tabel 2. 2 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Munjungagung

No	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
1.	TNI	6
2.	POLRI	8
3.	PNS	53
4.	Wiraswasta	261
5.	Buruh	325
6.	Petani	436
7.	Nelayan	197

Sumber: Data dari Desa Munjungagung yang diolah penulis, 2025

Dari keseluruhan data, kelompok masyarakat yang benar-benar aktif dalam kegiatan ekonomi yakni kelompok nelayan dan petani. Tidak hanya pada sektor perikanan dan pertanian, sektor usaha kecil dan perdagangan merupakan mata pencaharian dengan jumlah masyarakat tertinggi setelah buruh. Banyak masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan penghasilan dengan mencoba usaha kecil yang dapat dilakukan di rumah. Usaha kecil yang banyak dikerjakan oleh masyarakat adalah produksi aneka macam makanan ringan dan makanan berat, penjahit rumahan, salon, serta banyak yang membuka usaha kecil yang menjual sembilan bahan pokok (sembako) dalam rumah tangga. Setelah ditutupnya lokalisasi, perekonomian masyarakat di Desa Munjungagung masih belum stabil hingga saat ini.

Bahkan, banyak yang ditemukan sedang menganggur ataupun berpindah ke kota lain demi mencari pekerjaan.

Kedua sektor yang banyak dikerjakan oleh masyarakat tersebut ternyata setelah dilakukan penelitian, tidak sebanding dengan kondisi ekonomi yang di alami masyarakat Desa Munjungagung. Banyak masyarakat yang menjadi buruh pabrik, buruh harian lepas atau buruh musiman. Bahkan, hampir dari keseluruhan masyarakat yang bekerja sebagai buruh mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup rendah atau sederhana. Kondisi demikian juga dialami oleh masyarakat yang bekerja pada sektor usaha kecil dan perdagangan. Banyaknya warga yang membuka usaha kecil dengan berjualan sembako dirumahnya membuat persaingan antar tetangga yang membuka usaha kecil semakin tinggi. Hal ini terjadi pula pada masyarakat yang membuka warkop (warung kopi) yang membuat persaingan usaha sangat tinggi. Hal itu sangat berdampak pada penghasilan yang diterima. Tidak hanya itu, kondisi ekonomi masyarakat yang sering berhutang dalam belanjanya. Kebiasaan masyarakat yang sering berhutang juga menyebabkan tingkat perekonomian masyarakat rendah. Tidak hanya permasalahan pada kedua sektor itu saja, kesejahteraan hidup keluarga semakin parah dengan tingginya angka pengangguran. Angka pengangguran banyak ditemukan pada usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga. Melihat kenyataan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Munjungagung hampir sama yakni masih rendah.

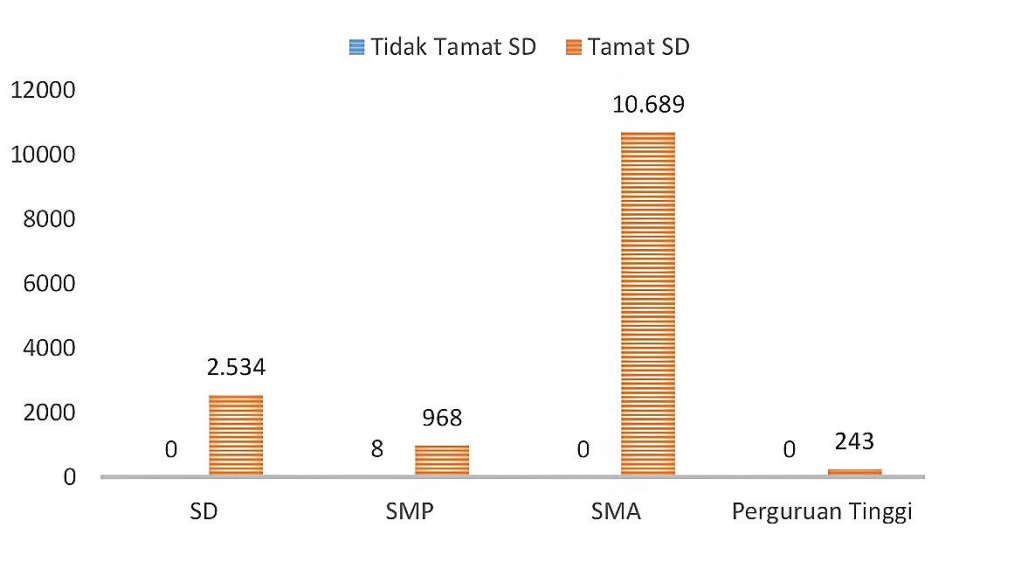
2.1.3 Kondisi Sosial Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain, dimana tidak bisa hidup sendiri (Santika et al., 2022). Begitupula yang terjadi pada masyarakat di Desa Munjungagung yang pada umumnya sebagian besar merupakan pekerja rumahan. Dimana dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka bekerja tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Masyarakat di Desa Munjungagung dalam aktivitasnya sudah sangat terbiasa berhubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan lain selain bekerja yang dapat dilakukan yakni melakukan kunjungan dari tetangga yang ingin melihat aktivitas yang sedang dilakukannya. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan sosial masyarakat mereka sering melakukan saling membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Munjungagung sangat tinggi ketika terdapat seorang tetangga mengalami kesulitan. Selain itu, sebagian besar masyarakat di Desa Munjungagung bersanak-saudara di wilayah tersebut juga.

Kerukunan masyarakat di Desa Munjungagung dapat terjadi ketika adanya kegiatan yang melibatkan golongan masyarakat. Kegiatan yang rutin dilakukan desa yakni menggerakkan aparat desa untuk mendatangi dan melihat kondisi masyarakat di tempat tinggalnya untuk sekedar bertanya bagaimana keadaan pada saat itu. Selain dari berbagai kelompok masyarakat, hubungan sosial juga dapat dibangun ketika terdapat kegiatan dari desa seperti pengajian rutin, PKK, bersih kampung, pelatihan UKM,

dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menemukan fakta bahwa hampir keseluruhan masyarakat di Desa Munjungagung mengenali dan mengetahui masyarakat lainnya. Tidak sedikit warga yang memiliki anggota keluarga yang berjumlah besar dan tinggal satu atap atau beda. Rata-rata pendidikan penduduk di Desa Munjungagung terbilang rendah. Hal itu kemudian menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di desa tersebut. Berikut data pendidikan masyarakat di Desa Munjungagung.

Gambar 2. 2 Grafik Pendidikan Terakhir Masyarakat



Sumber: Data dari Desa Munjungagung yang diolah penulis, 2025

Jumlah keseluruhan penduduk tetap di Desa Munjungagung yakni 6.728 jiwa. Pada tabel tersebut menjelaskan pendidikan terakhir yang ditempuh masyarakat dan belum termasuk penduduk yang belum bersekolah dan sedang sekolah. Jika dilihat dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Desa Munjungagung mengenyam pendidikan terakhir yakni pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau SMA.

2.2 Gambaran Sejarah dan Kebijakan Lokalisasi

2.2.1 Awal Kemunculan Lokalisasi Wandan

Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat setempat, keberadaan lokalisasi Wandan bermula pada sekitar tahun 1970-an. Pada masa tersebut, wilayah Desa Munjungagung masih didominasi oleh aktivitas pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil yang dilakukan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, munculnya aktivitas prostitusi di kawasan tersebut tidak serta-merta direncanakan sebagai suatu kawasan lokalisasi yang terorganisir. Namun, berkembang secara bertahap melalui proses sosial yang terjadi di masyarakat. Nama “Wandan” sendiri berasal dari nama seorang warga setempat yang dikenal pada masa itu sebagai seorang pemborong bangunan. Wandan memiliki sebuah rumah yang cukup besar dan sering digunakan sebagai tempat berkumpul para pekerja atau rekan-rekannya. Rumah tersebut kemudian salah satu titik awal berkembangnya aktivitas yang kemudian dikaitkan dengan praktik prostitusi.

Pada suatu ketika salah satu rekan Wandan menitipkan seorang perempuan yang merupakan istri mudanya untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Namun, setelah beberapa waktu orang yang menitipkan perempuan tersebut tidak kembali lagi. Dalam perkembangannya, perempuan tersebut kemudian menjalin hubungan dengan salah satu pekerja yang tinggal di tempat tersebut. Peristiwa tersebut kemudian menjadi awal mula munculnya aktivitas yang berkaitan dengan hubungan di luar

pernikahan di kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, rumah tersebut mulai dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tempat yang menyediakan jasa prostitusi secara informal. Informasi mengenai keberadaan tempat tersebut kemudian menyebar secara perlahan, terutama di kalangan para pekerja dan pendatang yang melintas di jalur Pantura. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang yang datang ke kawasan tersebut untuk mencari hiburan, sehingga aktivitas prostitusi mulai berkembang secara lebih luas.

Setelah munculnya aktivitas prostitusi secara informal, kawasan Wandan mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, lokasi Wandan menjadi salah satu lokasi prostitusi yang cukup dikenal di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Keberadaan jalur Pantura yang ramai dilalui kendaraan menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan kawasan tersebut. Pada masa itu, jumlah rumah yang digunakan sebagai tempat praktik prostitusi mulai bertambah. Beberapa warga mulai menyewakan rumah atau kamar kepada PSK yang datang dari berbagai daerah. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola pemukiman yang secara khusus dikenal sebagai kawasan lokalisasi.

Selain itu, muncul pula berbagai fasilitas pendukung yang berkaitan dengan aktivitas di lokalisasi, seperti warung makan, kios kecil, tempat hiburan sederhana, serta usaha jasa lainnya. Kehadiran fasilitas tersebut menjadikan kawasan Wandan tidak hanya sebagai tempat praktik prostitusi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi malam hari yang cukup ramai. Dalam perkembangannya, Lokalisasi Wandan juga dikenal sebagai salah

satu lokalisasi tertua di wilayah Kabupaten Tegal. Kawasan ini menjadi bagian dari jaringan lokalisasi yang berkembang di sepanjang jalur Pantura, di mana beberapa wilayah lain juga memiliki kawasan prostitusi yang serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi pada masa tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial yang berkaitan dengan mobilitas ekonomi dan interaksi sosial masyarakat di wilayah pesisir utara Jawa.

Keberadaan Lokalisasi Wandan tidak hanya berdampak pada aspek sosial masyarakat, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, kawasan lokalisasi seringkali menjadi pusat perputaran ekonomi informal yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Di Desa Munjungagung, beberapa warga memanfaatkan keberadaan lokalisasi sebagai sumber mata pencaharian tambahan. Banyak masyarakat yang membuka usaha kecil seperti warung makan, toko kelontong, penjual minuman, serta jasa parkir bagi para pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Selain itu, terdapat pula warga yang bekerja sebagai penjaga keamanan, tukang ojek, maupun penyedia jasa transportasi bagi para pengunjung.

Keberadaan aktivitas ekonomi tersebut secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan sebagian masyarakat lokal. Bagi sebagian warga, Lokalisasi Wandan menjadi salah satu sumber penghidupan yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, ketergantungan ekonomi terhadap keberadaan

lokalisasi juga menimbulkan dilema sosial bagi masyarakat. Di satu sisi, aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti stigma sosial, konflik nilai moral, serta potensi munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya.

2.2.2 Kondisi Geografis Kawasan Lokalisasi

Kawasan bisnis prostitusi atau yang dikenal dengan Wandan, berada di Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Area ini dikenal sebagai sebuah kawasan lokalisasi yang pada masa-masa sebelumnya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya aktivitas PSK di Kabupaten Tegal. Lokalisasi Wandan terletak di dekat jalur Jalan Raya Pantai Utara (pantura), tetapi secara spasial tidak berada di tengah permukiman umum penduduk desa melainkan berjarak dari wilayah pemukiman mayoritas warga desa. Kawasan ini lokasinya relatif terpencil dari kawasan permukiman pokok, namun tetap menjadi bagian dari struktur ruang desa karena berada dalam batas administratif Desa Munjungagung.

Lokalisasi pada umumnya berkembang di area yang mudah diakses tetapi relatif terpisah dari lingkungan permukiman padat guna memenuhi kebutuhan aktivitas yang kurang diterima secara sosial luas. Dalam kasus Wandan, ini berarti lokasinya bersinggungan dengan jalur pantura sehingga mudah dicapai dari luar desa, namun tetap tersembunyi dari pemukiman inti untuk meminimalkan interferensi sosial langsung dengan komunitas desa. Di kanan jalur Pantura banyak berdiri wisma-wisma dan tempat karaoke. Kawasan lokalisasi Wandan berada di lingkungan RW 02 yang mencakup

4 RT yaitu RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04. Wilayah bisnis prostitusi yang paling banyak yakni RT 04 hingga mencakup seluruh warga menjadi pelaku usaha dalam bisnis tersebut. Saat bisnis prostitusi itu masih ada, RT 04 merupakan lingkungan dengan tarif PSK, mucikari, wisma dan masyarakat terdampak paling tinggi diantara RT yang lainnya. Berikut rincian jumlah penghuni di kawasan Lokalisasi Wandan, yaitu:

Tabel 2. 3 Jumlah penghuni di kawasan lokalisasi Wandan

No	Penghuni	Jumlah
1	PSK	113
2	Mucikari/Germo	30
3	Wisma	30
4	Terdampak	88

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang diolah penulis, 2017

2.2.3 Sejarah Penutupan Lokalisasi Wandan

Penutupan lokalisasi prostitusi di berbagai daerah di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi praktik prostitusi serta mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Kebijakan ini juga berkaitan dengan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk menekan keberadaan lokalisasi prostitusi di berbagai wilayah. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan penertiban dan penutupan kawasan prostitusi yang dianggap sebagai sumber penyakit masyarakat. Di Kabupaten Tegal, kebijakan penutupan lokalisasi

mulai direncanakan secara sistematis oleh pemerintah daerah pada pertengahan dekade 2010-an. Pemerintah Kabupaten Tegal melihat bahwa keberadaan sejumlah lokalisasi prostitusi di sepanjang jalur Pantura telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya potensi penyebaran penyakit menular seksual, munculnya praktik perjudian dan peredaran minuman keras, serta kekhawatiran terhadap dampak negatif bagi generasi muda di wilayah sekitar.

Selain faktor sosial dan moral, kebijakan penutupan lokalisasi juga tidak terlepas dari adanya dorongan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang menargetkan Indonesia bebas dari lokalisasi prostitusi pada tahun 2019. Kebijakan tersebut kemudian direspons oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menutup sejumlah lokalisasi prostitusi yang berada di wilayahnya, termasuk Lokalisasi Wandan di Desa Munjungagung. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap sejumlah lokalisasi prostitusi yang masih beroperasi di wilayah Pantura Kabupaten Tegal. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Tegal pada tahun 2017, terdapat beberapa kawasan prostitusi yang menjadi sasaran penertiban, yaitu Peleman, Wandan, Gang Sempit, Turunan, dan Pengasinan. Dari data tersebut diketahui bahwa Lokalisasi Wandan merupakan salah satu kawasan dengan jumlah PSK dan mucikari yang cukup signifikan dibandingkan lokasi lainnya. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan kebijakan untuk menutup secara permanen

sejumlah lokalisasi prostitusi di wilayah Kabupaten Tegal sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyakit masyarakat dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

Proses penutupan Lokalisasi Wanda tidak hanya merupakan kebijakan administratif semata, tetapi juga melibatkan berbagai aktor politik dan institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. Aktor utama dalam kebijakan penutupan lokalisasi adalah Pemerintah Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal. Dalam pelaksanaannya, Wakil Bupati Tegal berperan aktif dalam memimpin koordinasi antar instansi pemerintah daerah untuk mempersiapkan proses penutupan lokalisasi. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain pemerintah daerah, terdapat pula keterlibatan instansi teknis seperti Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang bertanggung jawab dalam melakukan pendataan terhadap para pekerja seks komersial dan mucikari yang berada di kawasan lokalisasi. Dinas Sosial juga berperan dalam menyiapkan program rehabilitasi sosial serta pemberdayaan ekonomi bagi para penghuni lokalisasi setelah penutupan dilakukan.

Di tingkat nasional, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga terlibat dalam mendukung kebijakan penutupan lokalisasi di Kabupaten Tegal. Kementerian Sosial memberikan bantuan berupa program pelatihan

keterampilan serta bantuan dana bagi para pekerja seks komersial yang bersedia meninggalkan pekerjaannya. Keterlibatan pemerintah pusat menunjukkan bahwa penutupan lokalisasi merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam upaya mengurangi praktik prostitusi di Indonesia. Selain aktor pemerintah, proses penutupan juga melibatkan aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI yang bertugas menjaga keamanan serta memastikan proses penutupan berjalan dengan tertib. Pemerintah daerah juga melibatkan Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah yang memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dianggap melanggar norma sosial dan ketertiban umum. Dengan demikian, penutupan Lokalisasi Wanda merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor politik dan institusi pemerintahan yang bekerja secara koordinatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Sebelum kebijakan penutupan dilaksanakan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan berbagai langkah persiapan yang bertujuan untuk meminimalkan konflik sosial serta mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokalisasi serta kepada para penghuni lokalisasi, termasuk PSK, mucikari, dan pemilik wisma. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan penutupan serta alasan yang melatarbelakanginya. Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga melakukan pendataan terhadap para penghuni lokalisasi. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pekerja seks komersial, mucikari, serta

fasilitas yang terdapat di kawasan lokalisasi. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang program pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang terdampak oleh kebijakan penutupan.

Pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan kepada para pekerja seks komersial melalui program pelatihan kerja yang diselenggarakan di balai latihan kerja. Pelatihan tersebut meliputi berbagai keterampilan seperti tata boga, tata rias, serta keterampilan usaha kecil lainnya yang diharapkan dapat menjadi alternatif mata pencaharian bagi mereka setelah lokalisasi ditutup. Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan dana serta fasilitas transportasi bagi para PSK yang akan kembali ke daerah asalnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam membantu mereka melakukan proses reintegrasi sosial setelah meninggalkan kehidupan di lokalisasi. Proses sosial sebelum penutupan ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mengedepankan pendekatan persuasif dan pemberdayaan sosial dalam melaksanakan kebijakan penutupan lokalisasi.

Setelah melalui berbagai tahapan persiapan dan koordinasi antarinstansi, pemerintah daerah akhirnya melaksanakan penutupan lokalisasi prostitusi di wilayah Pantura Kabupaten Tegal pada tahun 2017. Penutupan tersebut dilakukan secara resmi pada tanggal 19 Mei 2017 dan mencakup tiga lokalisasi utama, yaitu Peleman, Wandan, dan Gang Sempit. Penutupan tersebut dilakukan melalui sebuah acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pejabat dari Kementerian Sosial

Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, para PSK yang berada di lokalisasi dikumpulkan dan diberikan pengarahan mengenai kebijakan pemerintah serta program bantuan yang akan diberikan kepada mereka.

Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat ratusan penghuni lokalisasi yang terdampak oleh kebijakan penutupan tersebut. Sebagian besar dari mereka kemudian dipulangkan ke daerah asal masing-masing setelah mengikuti program pembinaan dan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari program rehabilitasi sosial, para PSK yang bersedia meninggalkan pekerjaannya mendapatkan bantuan dana serta perlengkapan usaha sebagai modal awal untuk memulai usaha baru. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan baru setelah tidak lagi bekerja di lokalisasi. Setelah proses penutupan dilakukan, pemerintah daerah juga menempatkan aparat keamanan di sekitar bekas kawasan lokalisasi untuk memastikan bahwa aktivitas prostitusi tidak kembali beroperasi di wilayah tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban serta memastikan bahwa kawasan tersebut benar-benar bebas dari praktik prostitusi.

2.2.4 Dasar Hukum Penutupan Lokalisasi

Kebijakan penutupan Lokalisasi Wandan oleh Bupati Tegal ini merealisasikan dan didasari oleh dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 yang membahas tentang ketertiban umum di Kabupaten Tegal. Salah satu isi larangan dalam peraturan tersebut yaitu

menyebutkan adanya larangan terhadap kegiatan pelacuran di kawasan Kabupaten Tegal. Dalam kebijakan penutupan lokasi ini, sasaran utamanya yakni Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari. Tujuan penutupan ini untuk mewujudkan Kabupaten Tegal bebas prostitusi serta menindaklanjuti program nasional.